



RANCANGAN RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR TERNATE TAHUN 2021



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE
NOMOR : KEP / /II/REN.2.3./2020, TANGGAL FEBRUARI 2020



KEPUTUSAN KAPOLRES TERNATE

Nomor : KEP/ /II/ REN 2.3/2020

Tentang

RANCANGAN

RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR TERNATE T.A. 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembuatan Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Resor Ternate T.A. 2021, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat kepolisian Resor dan kepolisian Sektor;
 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
- Memperhatikan :
 1. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor : b-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-338/MK.02/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga T.A. 2020;
 2. Rancangan Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR TERNATE TAHUN ANGGARAN 2021.

1. Rancangan Rencana Kerja Polres Ternate T.A. 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Polres Ternate T.A. 2021;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
pada tanggal : Februari 2020



KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE

AZHARI JUANDA, S.IK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76080841

DAFTAR ISIHalaman

BAB I LATAR BELAKANG.....	
1. Kondisi Umum.....	
a. Perkembangan Aspek Kehidupan Daerah Ternate.....	
b. Analisis SWOT.....	
2. Identifikasi Masalah.....	
 BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	
3. Visi dan Misi.....	
a. Visi Polda Maluku Utara.....	
b. Misi Polda Maluku Utara.....	
c. Visi Polres Ternate.....	
4. Misi Polres Ternate.....	
5. Tujuan Jangka Menengah Polda Maluku dan Polres Ternate.....	
a. Tujuan Jangka Menengah Polda Maluku Utara.....	
6. Tujuan Jangka Menengah Polres Ternate.....	
a. Sasaran strategis dan Sasaran Prioritas Polda Maluku dan Polres Ternate.....	
b. Sasaran strategis Polda Maluku Utara.....	
c. Sasaran Strategis Polres Ternate.....	
d. Sasaran Prioritas Polda Maluku Utara.....	
e. Sasaran Prioritas Polres Ternate	
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	
7. Arah Kebijakan dan strategi Polda Maluku Utara.....	
8. Arah Kebijakan dan strategi Polres Ternate.....	
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN	
9. Program dan Kegiatan Polres Ternate Tahun 2021	
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Polri.....	
b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian	
c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	

- d. Program Pengembangan Strategi keamanan dan ketertiban.....
- e. Program Pemberdayaan potensi Keamanan.....
- f. Program Pemeliharaan Kamtibmas.....
- g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- h. Program Pengembangan Hukum Kepolisian

10. Usulan Pagu Ideal Polres Ternate Tahun 2021

BAB IV PENUTUP.....

11. Penutup.....

Lampiran :

- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polres Ternate Tahun 2021

RANCANGAN RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2021

I. LATAR BELAKANG.

1. Kondisi Umum

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari Tahapan Rencana Strategis Polres Ternate 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja (Renja) Polres Ternate T.A. 2020 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Polres Ternate T.A. 2021. Rancangan Rencana Kerja Polres Ternate T.A. 2021 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Renja Polda Maluku Utara T.A 2021. Rancangan Rencana Kerja Polres Ternate T.A. 2020 disusun dengan memperhatikan rencana strategis Polres Ternate Tahun 2020-2024 *logical framework Background study* RPJMN 2020-2024, yaitu : (1) Pilar keamanan dalam negeri; (2) Pilar pertahanan; 3) Pilar keamanan laut; dan (4) Pilar keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan tugas Polres Ternate telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan dengan ditandai diperolehnya predikat Zona Integritas dibidang Pelayanan Publik, banyaknya pengungkapan kasus - kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres Ternate dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Narkoba dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polres Ternate tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh elemen Polres Ternate dengan didukung oleh unsur eksekutif, unsur legislatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stake holders* yang terkait dengan tugas Kepolisian. Setiap torehan prestasi tidak serta merta membuat Polres Ternate puas dan berbangga diri, namun menjadikan tantangan bagi Polres Ternate dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

/Keberhasilan....

Keberhasilan yang diraih Polres Ternate diharapkan dapat membuat Polres Ternate semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan yang akan menghadang di kemudian hari. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polres Ternate untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat maupun pemerintah terhadap Polres Ternate tersebut antara lain : (1) Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri ditengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenang dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap setiap kejahatan serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polres Ternate. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah-olah telah menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku negatif seperti: materialistis, konsumtif dan hedonistis

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres Ternate yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategi tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan Daerah kota Ternate

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, selain disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di wilayah Kota Ternate, juga karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkungan Nasional, regional maupun global.

Agar.....

Agar Polri dalam jajaran Polres Ternate dapat secara tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan-kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1) Aspek Ideologi

Di wilayah Kota Ternate merupakan daerah pasca kerusuhan Horizontal yang terjadi pada tahun 1999, sudah mulai terbina kembali penghayatan serta pengamalan terhadap nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila serta UUD 1945 dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dimana hal tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat saat ini yang penuh dengan kesadaran untuk menghentikan pertikaian maupun berbagai perbedaan yang ada dan kembali hidup berdampingan dengan baik tanpa perasaan curiga antara satu kelompok dengan kelompok lain, maupun antar umat beragama.

2) Aspek Politik

- a) Tuntutan pemekaran wilayah menimbulkan masalah karena prosesnya terkesan dipaksakan sekelompok orang/tokoh di daerah tersebut dengan mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip daerah otonom seperti batas wilayah, partisipan masyarakat serta sumber daya yang masih kurang mendukung sehingga berpotensi terjadinya konflik horisontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- b) Kondisi budaya politik belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang sesuai dengan demokrasi yang benar, budaya politik masih bersifat parokhial, primordial, oportunistis, nepotis dan anarkis, indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan destruktif. etika politik belum sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi dan masih banyak terjadi pemaksaan kehendak serta adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik

- c) Pemilihan Walikota Ternate Periode Tahun 2020/2021, Konflik Internal Parpol, dengan banyaknya kepentingan dan ambisi pengurus Parpol mengakibatkan terjadinya persaingan, sehingga muncul konflik didalam tubuh partai itu sendiri yang dapat mengarah pada konflik antar massa pendukung
 - d) Kebebasan pers yang tumbuh dan berkembang yang belum diimbangi oleh tanggungjawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak memperhitungkan akibat pemberitaan.oleh media massa yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan resiko sosial politik.
- 3) Aspek Ekonomi
- a) Kebutuhan sembako masyarakat cenderung lebih meningkat, krisis pemadaman listrik di wilayah Kota Ternate yang masih sering terjadi, tingginya biaya masuk barang import ke Ternate.
 - b) Potensi wisata berupa wisata budaya dan purbakala dengan adat istiadat yang dikenal dengan Kesultanan Moloku Kieraha dan Potensi wisata bahari yang belum dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak pada peningkatan ekonomi.
 - c) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang dihasilkan oleh pembangunan dan peningkatan berbagai sarana penunjang pembangunan.
 - d) Potensi sumber daya alam Kota Ternate yang cukup besar baik dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan sangat strategis dan menarik perhatian berbagai pihak untuk mengelola potensi sumber daya alam tersebut baik secara legal maupun illegal.
 - e) Kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat Kota Ternate memiliki ketergantungan pada hasil bumi berupa kopra, pala dan cengkeh yang hasilnya diperoleh secara insidental dalam kurun waktu 3 bulan s/d 6 bulan dan disaat terjadi kenaikan harga komoditif mengundang kerawanan Kamtibmas.

4) Aspek Sosial Budaya

- a) Kehidupan sosial budaya yang semakin berkembang sejalan dengan pembangunan Bangsa dan Negara yang tidak terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi Dunia saat ini, sehingga masuknya nilai budaya asing sebagai dampak arus globalisasi keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi dapat menimbulkan kerawanan sosial budaya, hal ini dapat dilihat pada perubahan pada kehidupan yang konsumtif yang tidak didukung pendapatan perkapita yang memadai sehingga menimbulkan kerawanan Kamtibmas.
- b) Permasalahan tanah yang diperkirakan masih mewarnai kondisi sosial masyarakat meliputi:
- (1) Ketidakjelasan status kepemilikan tanah
 - (2) Kepemilikan tanah secara ganda/tumpang tindih kepemilikan.
 - (3) Penentuan tapal batas bagi wilayah pemekaran.
 - (4) Terjadinya pembebasan tanah/lahan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum sering menimbulkan gejolak massa yang berakhir dengan tindakan anarkis akibat proses ganti rugi yang tidak seimbang dimana pemerintah bertindak hanya berdasarkan proses hukum yang cenderung berpihak kepada pengembang maupun pemerintah itu sendiri.
- c) Perbedaan suku, aliran agama dan ras masih memungkinkan timbulnya benturan nilai kepentingan antara suku, agama / internal dan antara golongan dalam masyarakat antara lain:
- (1) Aliran agama islam meliputi aliran Ahmadiyah, aliran Syiah dan aliran Jamaah Tabligh ahlul Sunnah Waljamaah
 - (2) Aliran Agama Kristen protestan meliputi persaingan organisasi Gereja Masehi Injil Halmahera (GEMIH) dengan organisasi GEMIH pembaharuan dan aliran Yahopa yang tidak melaksanakan ibadah di Gereja akan tetapi Ibadah di rumah – rumah kelompoknya.

/Aspek....

5) Aspek Keamanan

a) Peningkatan gangguan keamanan dapat dilihat dari peningkatan gangguan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya intensitas dan kualitas kejahatan:

- 1) Kejahatan Konvensional yaitu kejahatan yang terjadi secara umum dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana di atur dalam KUHP.
- 2) Kejahatan Transnasional yang mungkin masih akan terjadi antara lain Narkotika, Penyelundupan Senpi, Terorisme, Kejahatan komputer.
- 3) Kejahatan terhadap kekayaan negara diantaranya : Korupsi, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Fishing, lingkungan hidup dan lain-lain.
- 4) Kejahatan berimplikasi kontijensi diantaranya konflik SARA, unjuk rasa anarkis, pekelahian pelajar / mahasiswa / kampung, konflik oknum TNI POLRI / aparat dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan yang besar diantaranya:

Jenis kejahatan sebagaimana tersebut diatas dapat terjadi sebagai dinamika kehidupan masyarakat yang selalu mewarnai peningkatan gangguan Kamtibmas.

- b) Kejahatan terhadap kekayaan Negara yang dilakukan oleh kelompok terorganisir yang memiliki modal kuat dan mampu mempengaruhi aparat Negara, tidak jarang menggunakan backing untuk menekan aparat Negara yang mencoba menegakkan hukum antara lain: Korupsi, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Fishing.
- c) Gangguan Kamtibmas yang berimplikasi kontijensi yang dapat berimplikasi kontijensi yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan yang besar, masih akan terus terjadi seperti:
 - 1) Konflik vertikal diantaranya perbedaan pendapat pada internal agama / golongan, perbedaan pendapat pada internal organisasi politik terkait dengan kebijakan politik.

8. Pagu Ideal Polres Ternate Tahun 2021

Alokasi pagu Ideal Polres ternate per Program perkegiatan dalam T.A. 2021 sebesar **Rp. 49.976.312.000,-** (Empat puluh sembilan Milliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri** dengan Pagu sebesar **Rp. 32.775.712.000,-** (Tiga puluh dua milliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan kegiatan:
 - Penerangan masyarakat sebesar **Rp. 83.280.000,-** (Delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); RM
 - Penyelenggaraan teknologi informasi sebesar **Rp. 24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah);RM
 - Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri sebesar **Rp. 32.667.732.000,-** (tiga puluh dua milliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;RM
 - Pengelola informasi dan dokumentasi sebesar **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) ;RM
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri** dengan pagu sebesar **Rp. 4.563.013.000,-**(empat puluh milliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan :
 - Layanan perkantoran Sarpras sebesar **Rp. 1.421.974.000,-**(satu milliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; PNBP
 - Layanan perkantoran sebesar **Rp. 3.141.039.000,-** (tiga milliar seratus empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; RM

- /- Program.....

c. **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri** dengan pagu sebesar **Rp. 322.000.000-** (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian kegiatan:

- Pertanggungjawaban Profesi sebesar **Rp. 57.750.000,-** (Lima puluh tujuh juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;RM
- Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri sebesar **Rp. 91.350.000,-** (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;RM
- Penegakkan Tata tertib dan Disiplin Polri sebesar **Rp. 154.010.000,-** (seratus lima puluh empat juta sepuluh ribu rupiah),- RM
- Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan sebesar **Rp. 19.190.000,-**(sembilan belas juta seratus sembilan ribu rupiah) RM

c. **Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban** dengan pagu sebesar **Rp. 1.809.081.000,-**(satu miliar delapan ratus sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian kegiatan:

- Dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban sebesar **Rp. 95.695.000,-** (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); PNBP
- Analisis keamanan sebesar **Rp. 177.000.000,-** (seratus tujuh puluh tujuh juta).- RM
- Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik sebesar **Rp. 373.312.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). RM
- Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi sebesar **Rp. 293.132.000,-** (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah),- RM
- Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial sebesar **Rp. 380.385.000** (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- RM

- **Penyelenggaraan.....**

- Penyelenggaraan strategi kemandan dan ketertiban bidang keamanan negara sebesar **Rp. 489.557.000,-** (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh juta). - RM

d. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan pagu sebesar **Rp. 1.755.021.000,-** (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian kegiatan:

- Pembinaan Potensi Keamanan sebesar **Rp. 1.755.021.000,-** (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) - RM

e. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pagu sebesar **Rp. 4.487.492.000,-** (empat milliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).- dengan rincian kegiatan:

- Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar **Rp. 2.291.990.000,-** (Dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);RM
- Pembinaan pelayanan fungsi sabhara sebesar **Rp. 942.514.000,-** (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;RM
- Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas sebesar **Rp. 757.520.000,-** (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); PNBP
- Pengendalian operasi kepolisian sebesar **Rp. 495.168.000,-** (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;RM

- / Program.....

- g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana** pagu sebesar **Rp 4.235.893.000,-** (Empat milliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan:
- Penindakan tindak pidana Umum sebesar **Rp. 2.648.767.000,-** (Dua Milliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);RM
 - Penindakan tindak pidana Narkoba sebesar **Rp. 1.291.048.000,-** (satu milliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah); RM
 - Penanganan tindak pidana Korupsi sebesar **Rp. 314.078.000,-** (tiga ratus empat belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; RM
- h. Program ke tujuh Pengembangan Hukum kepolisian** dengan anggaran sebesar **Rp. 9.800.000,-** (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan kegiatan sebagai berikut ;
- Penyusunan dan penyuluhan Hukum dengan anggaran sebesar **Rp. 9.800.000,-** (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ; RM
-

BAB V PENUTUP

9. Penutup

Demikian Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Resor Ternate Tahun Anggaran 2021 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di : Ternate
pada tanggal : Februari 2020



KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE

AZHARI JUANDA, S.IK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76080841

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU UTARA
RESOR TERNATE

RENCANA KERJA TAHUNAN POLRES TERNATE TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polres Ternate	a. Persentase penurunan aksi unjuk rasa dari tahun sebelumnya b. Persentase penurunan perkelahian antar kampung dari tahun sebelumnya c. Persentase tergelarnya Bhabinkamtibmas pada tiap desa	1,2 % 1,3 % 68,8 %	Kasat Intelkam Kasat Intelkam Kasat Binmas
2.	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan	Persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana	67,80 %	a. Kasat Reskrim b. Kasat Res Narkoba c. Kasat Lantas d. Kasat sabhara
3.	Terwujudnya SDM yang profesional	a. Peningkatan jumlah personel yang mendapatkan tanda penghargaan b. peningkatan jumlah penyidik yang bersertifikat c. Peningkatan jumlah personil polri yang telah mengikuti assesment jabatan	15 20 20	a. Kabag sumda a. Kasat Reskrim b. Kasat Res Narkoba c. Kasat Lantas d. Kasat Sabhara Kabag Sumda

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5
4.	Moderenisasi Tehnologi Polres Ternate	a. Persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres Ternate b. Penurunan pemberitaan negatif	70% 50%	Kasubbag Log Kasubbag Humas
5.	Sistem pengawasan Polres Ternate yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	a. Peningkatan Nilai AKIP polres Ternate b. Peningkatan Nilai RBP Polres Ternate c. Indeks Kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) Polres Ternate d. Nilai Kinerja Anggaran e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat f. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	80 83 80 90,40 80% 95%	Kabag Ren Kabag Ren Kabag Ren Kabag Ren Kasi Propam, Kasi Propam Kabag sumda/ Kasubagkum

Ditetapkan di : Ternate
 Pada tanggal : Februari 2020



AZHARI JUANDA, S.IK
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76080841